

SOSIOLOGI HUKUM PENDIDIKAN INDONESIA

Oleh:

Ainun Najib

Fakultas Syariah IAI Ibrahimy Situbondo

ainun_kanza080@yahoo.com

Abstract:

Embodiment of the mandate of 1945 constitution is the enactment of Law No. 20 Year 2003 on National Education System, which is a product of the first education law in the early 21st century. This law became the legal basis to establish a national education by applying the principles of democracy, decentralization, autonomy and education that upholds human rights. This law is the basis to develop a national education law by applying the principles of democracy, decentralization, autonomy and education that upholds human rights. Since the Declaration of Independence August 17, 1945, the law on the national education system has undergone several changes.

Of the many elements of educational resources, the curriculum is one element that can make a significant contribution to the development process of realizing the potential quality of the learners. There is no doubt that the curriculum, which was developed with based on competence is indispensable as an instrument to guide learners who are able to become a qualified human being and proactively meet the challenges of the times which always change and evolving.

Conceptually, the curriculum is an educational response to the needs of society and nation in developing its young generation. Pedagogically, educational curriculum is designed to give learners the opportunity to develop his or her potential in a fun learning environment and in accordance with his ability to have the desired quality of society and nation. Legally, the curriculum is a public policy that is based on the philosophical foundations of the nation and judicial decisions in the field of education.

Key words: *Sociology of Law, Education*

A. Pendahuluan

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Gelombang perubahan yang terjadi di Indonesia baik yang bersifat politik, ekonomi, sosial dan budaya membawa dampak yang begitu besar bagi semua komponen bangsa ini, tidak terkecuali Departemen Pendidikan Nasional. Banyak pakar pendidikan mengemukakan pendapatnya tentang faktor penyebab dan solusi mengatasi kemerosotan mutu pendidikan di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan secara "terencana" dari masa ke masa. Hasilnya cukup membanggakan untuk sekolah-sekolah tertentu di beberapa kota di Indonesia tetapi belum merata dan kurang memuaskan secara nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa solusi yang selama ini dijalankan mungkin saja belum menyentuh akar permasalahan.

Ironisnya, Negara kita seringkali latah dan mengadopsi sistem pendidikan dari negara-negara maju. Padahal tawaran konsep yang diadopsi atau diadaptasi dari negara-negara yang berhasil menerapkannya, bukanlah solusi ampuh mengatasi permasalahan pendidikan yang ada. Mengingat situasi, kondisi, latar budaya dan pola pikir bangsa kita tentunya tidak homogen dengan negara-negara yang diteladani.

Untuk mencapai sebuah tujuan, pendidikan harus memiliki pijakan formal yang digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsanya sendiri yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sehingga melahirkan peraturan formal yang tidak hanya mengikat akan tetapi juga dapat diterima dan menyatu dengan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pendidikan ini, disusun kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan juga metode pembelajaran. Kurikulum tersebut mencakup fokus program, media instruksi, organisasi materi, strategi pembelajaran, manajemen kelas, dan peranan pengajar. Kurikulum digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.²

¹ Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan* (Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama, 2007), hlm. 12.

² Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 51-52

Namun dalam sejarah perjalanan pendidikan di Indonesia penerapan kurikulum seringkali kandas di tengah jalan. Berbagai macam spekulasi bermunculan mengkritisi kegagalan demi kegagalan, dari kesalahan kurikulum pendidikan yang sentralistik sampai dengan pendidikan yang bersifat kapitalistik. Lalu benarkah gonta-ganti kurikulum merupakan indikasi kegagalan system pendidikan?

B. Sejarah Pendidikan Indonesia

Pendidikan di Langgar

Di setiap desa di Pulau Jawa terdapat tempat beribadah dimana umat Islam dapat melakukan ibadahnya sesuai dengan perintah agamanya. Tempat tersebut dikelola oleh seorang petugas yang disebut amil, modin atau lebai (di Sumatera). Petugas tersebut berfungsi ganda, disamping memberikan do'a pada waktu ada upacara keluarga atau desa, dapat pula berfungsi sebagai guru agama.³

Pendidikan di Pesantren

Dimana murid-muridnya yang belajar diasramakan yang dinamakan pondok-pondok tersebut dibiayai oleh guru yang bersangkutan ataupun atas biaya bersama dari masyarakat pemeluk agama Islam. Para santri belajar pada bilik-bilik terpisah tetapi sebagian besar waktunya digunakan untuk keluar ruangan baik untuk membersihkan ruangan maupun bercocok tanam.

Pendidikan Pada Abad Ke Dua Puluh Jaman Pemerintahan Hindia Belanda dan Pendudukan. Di kalangan orang-orang Belanda timbul aliran-aliran untuk memberikan kepada pendudukan asli bagian dari keuntungan yang diperoleh orang Eropa (Belanda) selama mereka menguasai Indonesia. Aliran ini mempunyai pendapat bahwa kepada orang-orang Bumiputera harus diperkenalkan kebudayaan dan pengetahuan barat yang telah menjadikan Belanda bangsa yang besar. Aliran atau paham ini dikenal sebagai Politik Etis (Etische Politiek). Gagasan tersebut dicetuskan semula oleh Van Deventer pada tahun 1899 dengan mottonya "Hutang Kehormatan" (de Eereschuld).⁴ Politik etis ini diarahkan untuk kepentingan penduduk Bumiputera dengan cara memajukan penduduk asli secepat-cepatnya melalui pendidikan secara

³ Joko Sayono, *Perkembangan Pesantren di Jawa Timur* (Malang: Jurnal Bahasa dan Seni UM Tahun 33, Nomor 1, Februari 2005), hlm. 57.

⁴ Zamakhsyari Dhofier, *Sejarah Tradisi Pesantren* (Jakarta: Makalah Tahun 2007), hlm. 2.

Barat.

Dalam dua dasawarsa semenjak tahun 1900 pemerintah Hindia Belanda banyak mendirikan sekolah-sekolah berorientasi Barat. Berbeda dengan Snouck Hurgronje yang mendukung pemberian **pendidikan** kepada golongan aristokrat Bumiputera, maka Van Deventer menganjurkan pemberian pendidikan Barat kepada orang-orang golongan bawah. Tokoh ini tidak secara tegas menyatakan bahwa orang dari golongan rakyat biasa yang harus didahulukan tetapi menganjurkan supaya rakyat biasa tidak terabaikan. Oleh karena itu banyak didirikan sekolah-sekolah desa yang berbahasa pengantar bahasa daerah, disamping sekolah-sekolah yang berorientasi dan berbahasa pengantar bahasa Belanda. Yang menjadi landasan dari langkah-langkah dalam pendidikan di Hindia Belanda, maka pemerintah mendasarkan kebijaksanaannya pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Pendidikan dan pengetahuan barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan penduduk Bumiputera untuk itu bahasa Belanda diharapkan dapat menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah
2. Pemberian pendidikan rendah bagi golongan Bumiputera disesuaikan dengan kebutuhan mereka⁵

Atas dasar itu maka corak dan sistem pendidikan dan persekolahan di Hindia Belanda pada abad ke-20 dapat ditempuh melalui dua jalur tersebut. Di satu pihak melalui jalur pertama diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan akan unsur-unsur dari lapisan atas serta tenaga didik bermutu tinggi bagi keperluan industri dan ekonomi dan di lain pihak terpenuhi kebutuhan tenaga menengah dan rendah yang berpendidikan.

Tujuan pendidikan selama periode kolonial tidak pernah dinyatakan secara tegas. Tujuan pendidikan antara lain adalah untuk memenuhi keperluan tenaga buruh untuk kepentingan kaum modal Belanda. Dengan demikian penduduk setempat dididik untuk menjadi buruh-buruh tingkat rendahan (buruh kasar). Ada juga sebagian yang dilatih dan dididik untuk menjadi tenaga administrasi, tenaga teknik, tenaga pertanian dan lain-lainnya yang diangkat sebagai pekerja-pekerja kelas dua atau tiga. Secara singkat tujuan pendidikan ialah untuk memperoleh tenaga-tenaga kerja yang murah. Suatu fakta menurut hasil Komisi Pendidikan Indonesia Belanda yang dibentuk pada tahun 1928 –

⁵ G. Drewes, *Snouck Hurgronje and the study of Islam* (Leiden: Bijdragen tot de Taal, Land- en Volkenkunde, 1957), hlm. 12.

1929 menunjukkan bahwa 2 % dari orang-orang Indonesia yang mendapat pendidikan barat berdiri sendiri dan lebih dari 83% menjadi pekerja bayaran serta selebihnya menganggur. Diantara yang 83% itu 45% bekerja sebagai pegawai negeri. Pada umumnya gaji pegawai negeri dan pekerja adalah jauh lebih rendah dibandingkan dengan gaji-gaji Barat mengenai pekerjaan yang sama.⁶

C. Pendidikan Dalam Bingkai Hukum

Roda perkembangan pendidikan di Indonesia dalam sejarahnya memiliki suatu rute yang cukup panjang yang menjadikan suatu sejarah tersendiri bagi pendidikan di Negara ini, selama perjalanan sejarah pendidikan tersebut masing-masing terbagi menjadi beberapa episode, dan hampir setiap episode yang dijalankan menggunakan Undang-Undang yang berbeda-beda sesuai masanya. Pada kali ini, kita akan fokuskan untuk mengupas sejarah perkembangan pendidikan Indonesia mulai awal kemerdekaan sampai sekarang. Undang-undang yang digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 bab XIII pasal 31 sebagai landasan konstitusional, tentang hak warga Negara untuk mendapatkan pengajaran dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu system pengajaran nasional yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
2. Undang-undang menurut UU No. 4 Tahun 1950 tentang dasa-dasar Pendidikan dan pengajaran di sekolah jo UU No. 12 tahun 1954 Tujuan pendidikan dan pengajaran menurut UU No. 4 Tahun 1950 Bab. II pasal 3 adalah "membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air".⁷ Selanjutnya pada tahun 1954 dikeluarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 Dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia. Undang-undang ini lahir sebagai akibat dari perubahan sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu, dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berganti menjadi Negara Republik Indonesia Serikat, dan kembali lagi menjadi negara kesatuan.

⁶ *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman* (Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1983) hlm. 20.

⁷ Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 Tentang dasa-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 02 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Undang-Undang ini dikatakan bahwa Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.⁸
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tujuan Nasional Pendidikan adalah terwujudnya system pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
5. Undang-Undang Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2010 tentang Pendidikan Karakter sebagai penyempurnaan pendidikan yang ditargetkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Untuk menjalankan Salah satu amanah yang diberikan oleh undang-undang yang telah dibuat diatas, maka pemerintah mengadakan proses pendidikan melalui berbagai macam kurikulum yang berbeda pula dan selalu mengalami pergantian sebagai usaha penyempurnaan. kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.⁹ klasifikasi kurikulum Pendidikan Indonesia antara lain:

1. Kurikulum Tahun 1947 (*Rentjana Pelajaran*)

Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang diberlakukan setelah Kemerdekaan Indonesia, sehingga kurikulum ini masih dipengaruhi oleh system pendidikan colonial Belanda dan Jepang. Sebagai pemula tentunya masih sangat banyak kekurangan yang ditemukan didalamnya, sehingga penerbitan UU. No 04 Tahun 1950 dijadikan dasar untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan atas segala kekurangan.

⁸ Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada tahun ini, belum dikenal istilah kurikulum, melainkan istilah *Rentjana Pelajaran* yang digunakan. Kemudian, Ciri-ciri dari Rencana Pelajaran 1947 ini sebagai model pembelajarannya antara lain: (a) sifat kurikulum *Separated Subject Curriculum* (1946-1947), (b) menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah, (c) jumlah mata pelajaran: Sekolah Rakyat (SR) – 16 bidang studi, SMP-17 bidang studi dan SMA jurusan B-19 bidang studi, dan d) materi pendidikan dan pengajaran : Mr. Soewandi.¹⁰

Kelebihan yang tampak menonjol dapat dilihat melalui model pembelajaran yang diterapkan, salah satunya proses pembelajaran telah menggunakan Bahasa Indonesia resmi secara keseluruhan dalam proses pendidikan. Sekalipun masih banyak mengadopsi konsep pendidikan penjajah, namun sudah bernilai lebih untuk suatu kurikulum pemula. Sedangkan kekurangan yang dimiliki Rencana Pembelajaran ini secara umum tampak pada pengonsepan model pembelajaran yang masih menggunakan system pendidikan colonial Belanda dan Jepang dan belum mampu berdiri sendiri.

Solusi yang paling tepat untuk pemula tentunya harus segera memosisikan diri sebagai Negara yang telah merdeka dan harus segera menemukan jati diri dalam system pendidikan yang mandiri tanpa harus mengikuti peninggalan penjajah, sekalipun hal ini memerlukan waktu yang tidak singkat dan mungkin melalui proses kegagalan pengambilan keputusan dahulu sebagai bentuk koreksi kekurangannya.

2. Kurikulum Tahun 1952 (*Rentjana Pelajaran Terurai*)

Kurikulum kedua ini merupakan proses penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, tentunya pencapaian tujuan yang berdasar pada UU. No 04 Tahun 1950. Pada kurikulum ini mata pelajaran lebih diperinci yang dikenal dengan *Rencana Pelajaran Terurai 1952*. Kurikulum ini berciri khas tentang system pendidikan yang sudah mulai menasionalis serta disetiap rencana pelajaran yang harus memperhatikan ialah isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.

Kelebihan Rencana Pelajaran ini adalah terletak pada mulai tampaknya warna nasionalis pada penyusunan system, sehingga dapat menambahkan semangat nasionalisme bagi seluruh subjek dan objek yang dikenai kurikulum ini. Selain itu, mata pelajaran yang diberikan sudah mulai mempertimbangkan tingkat kemanfa'atannya, sehingga isi pelajaran sudah dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Namun, terdapat pula

¹⁰ www.wawasanpendidikan.com, *Kurikulum Sekolah dari Rencana Pelajaran 1947 hingga Kurikulum 2013*, 28 September 2013

kekurangan dalam masih kurangnya penyempurnaan target insane Indonesia yang berkompotensi tinggi, karena kurikulum ini masih bertargetkan pendidikan sangat mendasar (calistung). Dan solusi yang tepat, masih hampir serupa dengan solusi sebelumnya, agar selalu koreksi system sehingga Indonesia akan tetap terjaga kemerdekaannya.

3. Kurikulum Tahun 1964 (*Rentjana Pendidikan*)

Rencana pendidikan ini juga masih merupakan penyempurnaan dari rencana pelajaran sebelumnya, dalam rencana ini, pemerintah menfokuskan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral (*Pancawardhana*). Mata pelajarannya pun telah diklasifikasikan dalam menjadi lima kelompok bidang studi, diantaranya: moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan (keterampilan), dan Jasmani. Inti dari rencana pendidikan ini bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana (Hamalik, 2004) tersebut.

Kelebihan rencana pendidikan ini terletak pada titik penyempurnaan system sebelumnya, dimana terdapat *pancawardhana* yang lebih membekali siswa dasar sebagai ilmu inti kebutuhan hidup. Sebagai antisipasi positif bilamana mereka tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan kekurangan ditemukan pada masih rendahnya perhatian system ini pada jiwa kepancasilaan dan iptek yang sudah mulai berkembang di Negara-negara lain. Kemudian solusinya, juga masih tetap sama dengan sebelumnya, harus senantiasa mengintrospeksi hasil system yang digunakan dan dipertimbangkan sebelum diadakan perubahan system baru.¹¹

4. Kurikulum Tahun 1968

Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari *Pancawardhana* menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila

¹¹ *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman* (Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1983) hlm. 29.

sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.

Kelebihan kurikulum ini terletak pada penambahan tujuan pendidikan dalam mencetak jiwa pancasila sejati dan peningkatan kecerdasan dan keterampilan yang memang sudah ditargetkan pada kurikulum sebelumnya. Sedangkan kekurangannya pun masih ditemukan, yakni belum terfokuskan pada seluruh tujuan pencapaian yang dicantumkan pada UU. No.04 tahun 1950. Dan solusi yang tepat sebagai penyempurnaan yakni kembali berorientasikan pada dasar pijakan yang memang masih berlaku resmi dan belum dirubah.

5. Kurikulum Tahun 1975

Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 ini memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan dalam model pembelajarannya, diantaranya:

- a. Berorientasi pada tujuan (UU. No.04 tahun 1950),
- b. Menganut pendekatan *integrative* (setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif),
- c. Penjurusan di SMA dibagi atas 3 yaitu : jurusan IPA, IPS dan Bahasa
- d. Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu, dan
- e. Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), serta
- f. Dipengaruhinya psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon (rangsang-jawab) dan latihan (*drill*).¹²

Beberapa ciri khas kurikulum ini menjadikan suatu kelebihan tersendiri yang dimiliki sehingga mampu bertahan hingga hampir kurun waktu sepuluh tahun, karena hampir seluruh ciri-ciri diatas merupakan hasil penyempurnaan yang belum ditemukan sebelumnya. Sedangkan kekurangan ditemukan hanya berjumlah minimum saja, yakni terletak pada terlalu terperinci tujuan setiap mata pelajaran khusus yang harus dicapai, hal ini sedikit membuat guru dan siswa mengalami penekanan dalam usaha pencapaian yang diharuskan. Dalam hal ini, tampak usaha pendidikan lebih didominasi guru dan siswa menjadi kurang aktif karena metode yang digunakan masih system berceramah, yang guru

¹² www.wawasanpendidikan.com, *Kurikulum Sekolah dari Rencana Pelajaran 1947 hingga Kurikulum 2013*, 28 September 2013

menjelaskan siswa hanya mendengarkan saja. Kemudian solusinya, harus tetap diintrospeksi hasil kurikulum setiap tahunnya serta disimpulkan kekurangannya, dan digunakan sebagai bahan acuan pertimbangan guna menyusun kurikulum baru.

6. Kurikulum Tahun 1984

Kurikulum ini merupakan kurikulum revisi dan penyempurnaan dari kurikulum 1975 yang dianggap sudah *out of date*, setelah melalui pertimbangan yang panjang. Beberapa model pembelajarannya antara lain:

- a. Berorientasi kepada tujuan instruksional (target pencapaian siswa),
- b. Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif (CBSA), yang memberi kesempatan penuh pada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor.
- c. Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral (pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran dan sesuai tingkatan siswa)
- d. Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan serta Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa,
- e. Menggunakan pendekatan keterampilan proses. (memberi tekanan kepada proses pembentukan keterampilan, memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehannya)

Beberapa kelebihan yang ditemukan terletak pada penyempurnaan model pembelajaran yang digunakan, diantaranya: dilakukannya pendekatan spiral, pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CSBA), pendekatan keterampilan proses, target pemahaman pelajaran seutuhnya sesuai kondisi siswa, dan berorientasi kepada tujuan instruksional. Selain beberapa kelebihan yang dimiliki, masih saja ditemukan beberapa kekurangan dimana belum dapat tercapainya seluruh target karena pengamalan berbagai elemen pendidikan yang belum semuanya berdasar pada model pembelajaran diatas, selain itu proses sosialisasi pemerintah pusat pun dinilai kurang untuk memahami guru dalam pengamalannya. Dan penyempurnaan sosialisasi kedaerah-daerah sekaligus sebagai wadah untuk mendengarkan suara rakyat mungkin dapat dijadikan solusi yang

tepat, agar system yang telah dirancang begitu baik tersebut tidak sia-sia belaka, melainkan mampu diimplementasikan sesuai prosedur dan mampu mencapai target yang gemilang.

7. Kurikulum Tahun 1994

Kurikulum ini dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Model pembelajaran yang digunakan ialah salah satunya perubahan sistem pembagian waktu pelajaran (perubahan dari sistem semester ke sistem caturwulan), kemudian Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat (berorientasi kepada materi pelajaran/isi) dan pendekatan penguasaan materi (*content oriented*).

Kurikulum penyempurnaan ini sangatlah diharapkan dapat menjembatani berbagai macam problematika dan kejanggalan system pendidikan di Indonesia. Beberapa kelebihan yang mampu digapai terletak pada model penyusunan pelajaran yang lebih padat dan terperinci, hal ini membuktikan betapa Indonesia siap *melek* iptek dan siap untuk menjawab tantangan zaman yang akan begitu kompleks dengan klasifikasi mata pelajaran yang beraneka ragam tersebut, sehingga diharapkan mampu melahirkan tenaga ahli sesuai klasifikasi masing-masing.¹³

Namun dilain sisi, terdapat pula banyak kekurangan yang ditemukan, salah satunya terletak pada terlalu padatnya aspek yang dikedepankan, sehingga sangat membebani siswa yang berpengaruh pada merosotnya semangat belajar siswa dan menyebabkan mereka enggan belajar lama di sekolah, sehingga mutu pendidikan pun semakin terpuruk. Jika sejak awal siswa dicemaskan dengan mata pelajaran yang menjadi momok di sekolah, maka mereka akan menjadi bosan dan kegiatan belajar mengajar menjadi menyebalkan. Selain itu, kekurangan lain yakni masih diberlakukannya system pengajaran satu arah, dimana murid tidak diberikan banyak waktu untuk berekspresia mengingat guru diharuskan mencapai target dengan menggunakan alokasi waktu yang cukup singkat.

Solusi yang perlu dikembangkan mungkin terletak pada usaha penghapusan kekurangan yang dianggap momok dari kegagalan system pendidikan tersebut, baik masalah padatnya pelajaran maupun system satu arah diatas. Dan segera digantikan pada penyempurnaan system yang baru.

8. Kurikulum Tahun 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi)

¹³ *Ibid.*

Kurikulum ini merupakan nafas baru di dunia pendidikan sekaligus sebagai hasil usaha penyempurnaan program jangka panjang sepuluh tahun, kurikulum ini juga sebagai buah implementasi dari UU. No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum ini diberi nama *Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)*. Model pembelajarannya lebih menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar *performance* yang telah ditetapkan. Tentunya pemilihan kompetensi siswa selayaknya berorientasi pada pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan sistem pembelajaran. Dapat disebutkan bahwa Inti dari KBK atau kurikulum 2004 adalah terletak pada empat aspek utama, yaitu : 1) kurikulum dan hasil belajar, 2) pengelolaan kurikulum berbasis sekolah, 3) kegiatan belajar mengajar, dan 4) evaluasi dengan penilaian berbasis kelas. Kurikulum ini digunakan hanya sampai tahun 2006 saja, karena dipandang perlu diadakannya penyempurnaan sesuai kondisi dan pencapaian selama dua tahun digunakan.

Pembaharuan model pembelajaran KBK ini dapat dijadikan kelebihan khusus yang dimiliki, salah satunya sudah diterapkannya system interaksi dua arah antara guru dan murid, bahkan murid dituntut menjadi pusat pembelajaran pada system ini yang merupakan kebalikan dari system sebelumnya. Selain itu system ini berpusat pada siswa dan menggunakan pendekatan menyeluruh dan kemitraan, serta mengutamakan proses pembelajaran dengan pendekatan kontekstual (*contextual teaching and learning* atau CTL) yang hal ini mejadikan titik kelebihan bagi KBK yang belum ada sebelumnya.¹⁴

Dilain pihak, sisi kekurangan pun tampak pada kesamarataan objek siswa yang digunakan, belum diadakannya spesifikasi antara pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Karena tidak mungkin tingkat kompetensi ketiga tingkatan siswa tersebut disamaratakan, ditinjau dari segi usia didik, mungkin siswa SMA sudah mampu berkompetensi mandiri dengan sedikit bimbingan, namun bagaimana dengan siswa TK, SD, ataupun SMP.

Sehingga muncul solusi yang dapat dikembangkan, dimana harus diadakannya pengklasifikasian antara ketiga tingkatan tersebut dengan tetap mengacu pada system Kompetensi siswa, pertimbangan ini yang melahirkan penyempurnaan system selanjutnya pada tahun 2006, yakni Sistem Tingkat Satuan Pendidikan.

¹⁴ *Ibid*

9. Kurikulum Tahun 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ini merupakan kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan yang berlaku dewasa ini di Indonesia. Pada KTSP ini Terdapat perbedaan mendasar dengan kurikulum berbasis kompetensi sebelumnya (2004) dan kurikulum sebelumnya, yakni pada system pengembangannya, perubahan system sentralistik (terpusat) menjadi system desentralistik (daerah) bahwa sekolah diberi kewenangan penuh menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan, mulai dari tujuan, visi – misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, hingga pengembangan silabusnya.

Sisi kelebihan pada KTSP ini terletak pada system desentralistik yang dinilai lebih mampu untuk mendiagnosa kekurangan daerah masing-masing dengan cepat, dan system pengklasifikasian pada setiap satuan pendidikan yang berbeda-beda, hal ini tentunya lebih memudahkan proses penyusunan model pembelajaran sesuai konsumen (siswa). KTSP ini merupakan penyempurnaan akhir yang sedang berlaku saat ini, semoga keberadaannya mampu mencapai tujuan pendidikan seutuhnya.¹⁵

Namun, masih pula ditemukan kekurangan yang sebenarnya minim disebabkan karena kurikulum yang diberlakukan, akan tetapi kekurangan lebih condong disebabkan pada proses pengamalan konsep kurikulum yang sudah disetting sebaik mungkin tersebut, dan penyimpangan-penyimpangan subjeknya sendiri.

Dan solusi yang paling tepat, selayaknya pemerintah sebagai tokoh utama pembuat kebijakan kurikulum hendaknya menjalankan kurikulum ini dengan pengawasan ganda, yakni pengawasan pelaksanaan kurikulum pada seluruh jenjang satuan pendidikan agar berjalan sesuai prosedur, dan pengawasan ekstra pada penegak kurikulum itu sendiri mengingat banyaknya penyimpangan yang muncul. Jika hal ini tercapai, maka proses pendidikan di Indonesia dapat diprediksi akan jauh lebih baik, sehingga pada tahun mendatang tidak perlu diadakan perubahan total yang dapat membingungkan subjeknya, namun cukup diberikan tambahan sebagai proses penyempurnaan.

10. Kurikulum 2013 (kurikulum berkarakter)

Implementasi Kurikulum 2013 membawa tiga perubahan besar, perubahan pertama adalah pada konsep kurikulum itu sendiri. Konsep itu perpaduan antara *hardskill* dan *softskill*. Artinya, tidak hanya memberikan

¹⁵ *Ibid*

bekal pengetahuan pada siswa tapi juga ketrampilan. Penilaian konsep kurikulum 2013 berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses penilaian. Perubahan kedua adalah pada buku yang dipakai. Buku tersebut berbasis kegiatan serta tematik terpadu. Tidak ada syarat khusus dalam mengajarkan kurikulum baru hanya menuntut guru kreatif. Dan kurikulum 2013 tidak bisa diajarkan jika guru tidak ikut pelatihan. Dan perubahan ketiga yakni menekankan proses pembelajaran dan penilaian. Pembelajaran kurikulum 2013 menggunakan pendekatan *scientific* atau pengamatan. Maksudnya dalam mengajar peserta didik guru dapat meminta anak untuk bertanya dan mendorong anak mencari tahu. Mendorong anak berpikir kreatif, inovatif, afektif, produktif. Kurikulum 2013 tak akan sukses jika guru tidak menghayati materi tersebut.¹⁶

D. Visi Pendidikan Dua Dekade

Umar bin Khatab, orang bijak di abad ke 7 masehi mengatakan: *"Didiklah anak-anakmu karena mereka akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zamanmu"*.¹⁷

Konten pendidikan dari kehidupan bangsa masa kini memberi landasan bagi pendidikan untuk selalu terkait dengan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, kemampuan berpartisipasi dalam membangun kehidupan bangsa yang lebih baik, dan memosisikan pendidikan yang tidak terlepas dari lingkungan sosial, budaya, dan alam. Lagipula, konten pendidikan dari kehidupan bangsa masa kini akan memberi makna yang lebih berarti bagi keunggulan budaya bangsa di masa lalu untuk digunakan dan dikembangkan sebagai bagian dari kehidupan masa kini.¹⁸

Peserta didik yang mengikuti pendidikan masa kini akan menggunakan apa yang diperolehnya dari pendidikan ketika mereka telah menyelesaikan pendidikan 12 tahun dan berpartisipasi penuh sebagai warganegara. Atas dasar pikiran itu maka konten pendidikan yang dikembangkan dari warisan budaya dan kehidupan masa kini perlu diarahkan untuk memberi kemampuan bagi peserta didik menggunakannya bagi kehidupan masa depan terutama masa dimana dia

¹⁶ www.suamamerdeka.com, Kurikulum 2013 Bawa Tiga Perubahan Besar, 21 September 2013.

¹⁷ Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 63.

¹⁸ Forum Mangunjaya, *Kurikulum yang Mencerdaskan*, (Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS, 2007), hlm. 30.

telah menyelesaikan pendidikan formalnya. Dengan demikian sikap, keterampilan dan pengetahuan yang menjadi konten pendidikan harus dapat digunakan untuk kehidupan paling tidak satu sampai dua dekade dari sekarang. Artinya, konten pendidikan yang dirumuskan dalam Standar Kompetensi Lulusan dan dikembangkan dalam kurikulum harus menjadi dasar bagi peserta didik untuk dikembangkan dan disesuaikan dengan kehidupan mereka sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warganegara yang produktif serta bertanggungjawab di masa mendatang.¹⁹

Secara konseptual, kurikulum adalah suatu respon pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan bangsa dalam membangun generasi muda bangsanya. Secara pedagogis, kurikulum adalah rancangan pendidikan yang memberi kesempatan untuk peserta didik mengembangkan potensi dirinya dalam suatu suasana belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan dirinya untuk memiliki kualitas yang diinginkan masyarakat dan bangsanya. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan.²⁰

Sebagai amanah dari undang-undang sistem pendidikan nasional, sudah sepatutnya peninjauan kurikulum dilakukan dari masa ke masa. Dalam tinjauan ilmu Sosiologi Hukum disebutkan kalau hukum yang baik adalah hukum yang selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Hal ini selaras dengan salah satu Ilmu Hukum asal Jerman, Friedrich Carl von Savigny yang menyatakan: "*Das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*" (hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat). Syarat hukum yang baik yang lain yaitu memenuhi aspirasi masyarakat.²¹

Kurikulum adalah merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.²² Silang pendapat di setiap perubahan kurikulum pasti terjadi. Tetapi seharusnya bukan penolakan terhadap perubahan, melainkan pada substansi kurikulum apakah sudah dapat memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai zamannya. Tujuan

¹⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Dokumen Kurikulum 2013*, Desember 2012, hlm. 4

²⁰ *Ibid.* hlm. 4

²¹ Yesmil Anwar & Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Bandung: Grasindo, 2008), hlm. 161

²² UU nomor 20 tahun 2003; PP nomor 19 tahun 2005

merupakan komponen yang paling utama karena akan menentukan komponen lainnya yaitu isi, bahan ajar dan cara penyajian.

E. Kesimpulan

Serentetan kisah Perjalanan pendidikan dan kurikulumnya sepanjang sejarah bangsa Indonesia merdeka diatas, jelas menunjukkan betapa pelaksanaan kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan proses uji coba kebijakan tersebut, sehingga berefek pada mudahnya pemerintah merubah dan mengganti suatu kurikulum pendidikan, sekalipun belum cukup berjalan lima tahun atau bahkan sepuluh tahun, namun telah direnovani dan diganti dengan yang baru. Padahal, tidak seharusnya kurikulum lekas diubah sebelum memastikan melalui peninjauan dan penelitian yang konkrit sehingga tidak membingungkan subjek yang berada didalamnya. Sekalipun memang satu tujuan mulia pemerintah untuk menggapai puncak kesempurnaan system pendidikan Indonesia, namun pasti terdapat langkah-langkah yang lebih koefisien lagi yang perlu dipertimbangkan agar tujuan tersebut dapat tercapai baik, bukan malah sebaliknya yang rusak dan tidak koefisien karena seringnya perubahan system yang dilakukan.

Dilain sisi, pemerintah telah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk pendidikan Indonesia. Hal ini tampak pada semangat pemerintah dalam pengolahan kurikulum sehingga terjadi pergantian kurikulum yang begitu sering. Kegagalan kurikulum bukan disebabkan oleh kelemahan kurikulum itu sendiri. Perubahan kurikulum bukan berarti bahwa kurikulum sebelumnya itu jelek atau gagal. Kurikulum pendidikan mutlak harus selalu ditinjau kembali dan disempurnakan setiap saat. Mengingat bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana, di era turbulensi perubahan saat ini, diperlukan orang-orang yang peka dan tanggap terhadap perubahan kebutuhan. Para pelaksana pendidikan harus dapat membuat perencanaan untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi kehidupannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan zamannya. Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional maka pengembangan kurikulum haruslah berakar pada budaya bangsa, kehidupan bangsa masa kini, dan kehidupan bangsa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama, 2007.
- Feisal, Jusuf Amir, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Suyono, Joko, *Perkembangan Pesantren di Jawa Timur*, Malang: Jurnal Bahasa dan Seni UM Tahun 33, Nomor 1, Februari 2005.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Sejarah Tradisi Pesantren*, Jakarta: Makalah Tahun 2007
- G. Drewes, *Snouck Hurgronje and the study of Islam*, Leiden: Bijdragen tot de Taal, Land- en Volkenkunde, 1957.
- Forum Mangunjaya, *Kurikulum yang Mencerdaskan*, Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS, 2007.
- Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1983
- www.wawasanpendidikan.com, *Kurikulum Sekolah dari Rencana Pelajaran 1947 hingga Kurikulum 2013*, 28 September 2013
- www.suaramerdeka.com, *Kurikulum 2013 Bawa Tiga Perubahan Besar*, 21 September 2013.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Dokumen Kurikulum 2013*, Desember 2012.
- Yesmil Anwar & Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bandung: Grasindo, 2008.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Dasa-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- PP nomor 19 tahun 2005 Tentang Standard Nasional Pendidikan

"Sosiologi Hukum Pendidikan Indonesia"



LISAN AL-HAL

JURNAL PENGEMBANGAN PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMIYAH

